

KERJASAMA MARITIM INDONESIA-AUSTRALIA DALAM MEWUJUDKAN VISI INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (IMO) UNTUK MENINGKATKAN KESELAMATAN TRANSPORTASI LAUT

Herni Bunga Bangalangke¹, Eliyanti Mokodompit²
University of Halu Oleo Kendari, South East Sulawesi Indonesia^{1,2}
Email: hernibunga56@gmail.com

Keywords	Abstrak
Cooperation, Maritime, Indonesia, Australia, International Maritime Organization, IMO, Sea Transportation.	<i>Supporting Maritime cooperation between Indonesia and Australia plays a strategic role in the vision and mission of the International Maritime Organization (IMO), especially in improving the safety of maritime transportation. This article discusses forms of bilateral cooperation that include training of seafarers, strengthening navigation and search-and-rescue (SAR) systems, harmonization of shipping regulations with IMO standards, and strengthening maritime institutional capacity. This study uses a qualitative-descriptive approach with documentation studies and analysis of maritime policies of both countries. The findings show that the collaboration between Indonesia and Australia significantly encourages the implementation of IMO shipping safety principles through improving safety infrastructure, educating seafarers, and responding quickly to maritime incidents. In addition, this cooperation contributes to the fulfillment of international standards, especially within the framework of SOLAS and IMSAS. This article recommends increasing the sustainability of technical cooperation and strengthening the cross-border maritime monitoring system as concrete steps towards safer, more efficient, and more sustainable shipping in the Indo-Pacific region.</i>
Kerjasama, Maritime, Indonesia, Australia, Internazional Maritime Organization, IMO, Transportasi Laut.	<i>Mendukung Kerja sama maritim antara Indonesia dan Australia memegang peranan strategis dalam visi dan misi International Maritime Organization (IMO), khususnya dalam peningkatan keselamatan transportasi laut. Artikel ini membahas bentuk-bentuk kerja sama bilateral yang mencakup pelatihan pelaut, penguatan sistem navigasi dan pencarian-penyelamatan (SAR), harmonisasi regulasi pelayaran dengan standar IMO, serta penguatan kapasitas kelembagaan maritim. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi dokumentasi dan analisis kebijakan maritim kedua negara. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi Indonesia-Australia secara signifikan mendorong implementasi prinsip keselamatan pelayaran IMO melalui peningkatan infrastruktur keselamatan, edukasi pelaut, serta respon cepat terhadap insiden laut. Selain itu, kerja sama ini berkontribusi terhadap pemenuhan standar internasional, terutama dalam kerangka</i>

SOLAS dan IMSAS. Artikel ini merekomendasikan peningkatan keberlanjutan kerja sama teknis dan penguatan sistem pemantauan maritim lintas batas sebagai langkah konkret menuju pelayaran yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan di kawasan Indo-Pasifik.

1. PENDAHULUAN

Keselamatan transportasi laut merupakan isu krusial dalam dinamika perdagangan global dan konektivitas antarnegara, terutama bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah yurisdiksi maritimnya. Dalam konteks ini, kerja sama internasional menjadi strategi penting untuk memperkuat kapasitas nasional dalam mengelola risiko maritim, meningkatkan kompetensi pelaut, serta memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan internasional.

Salah satu mitra strategis Indonesia dalam bidang maritim adalah Australia. Letak geografis yang berdekatan serta kepentingan bersama dalam menjaga stabilitas dan keamanan laut di kawasan Indo-Pasifik mendorong kedua negara untuk membangun berbagai bentuk kolaborasi maritim. Kerja sama ini mencakup penguatan sistem navigasi, pencarian dan penyelamatan (SAR), pelatihan sumber daya manusia maritim, hingga harmonisasi regulasi pelayaran.

International Maritime Organization (IMO), sebagai badan khusus PBB yang bertanggung jawab terhadap keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan laut, memiliki visi untuk menjamin pelayaran yang aman, terjamin, efisien, dan ramah lingkungan. Dalam mencapai misi tersebut, IMO mendorong kerja sama antarnegara anggota guna membangun sistem regulasi terpadu serta meningkatkan kapasitas negara-negara berkembang dalam sektor maritim.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi kerja sama bilateral Indonesia-Australia terhadap visi dan misi IMO, khususnya dalam meningkatkan keselamatan transportasi laut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen kebijakan, laporan kerja sama, dan regulasi internasional, tulisan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana kolaborasi antarnegara dapat berperan dalam menciptakan sistem pelayaran yang lebih aman dan berkelanjutan. Selain itu,

artikel ini juga mengidentifikasi tantangan serta peluang strategis dalam memperkuat peran Indonesia di forum maritim internasional melalui kerja sama kawasan.

2. LANDASAN TEORI

Kerja sama internasional merupakan suatu bentuk interaksi antarnegara yang bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama melalui mekanisme saling menguntungkan. Menurut Keohane (1984), kerja sama dapat terbentuk ketika negara-negara menyadari adanya saling ketergantungan dalam isu tertentu, seperti keamanan maritim. Dalam konteks ini, kerja sama maritim Indonesia-Australia mencerminkan bentuk kolektif untuk menghadapi tantangan lintas batas seperti kecelakaan laut, penyelundupan, dan polusi laut.

Keamanan maritim tidak hanya menyangkut aspek militer, tetapi juga meliputi keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, dan penegakan hukum laut. Buzan et al. (1998) menyatakan bahwa pendekatan keamanan non-tradisional mendorong negara-negara untuk berkolaborasi secara lintas sektor dalam menghadapi ancaman bersama. Dalam hal ini, kerja sama dalam bidang keselamatan pelayaran menjadi bagian penting dari upaya menciptakan stabilitas regional.

Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS) merupakan kerangka utama IMO yang mengatur keselamatan kapal dan pelaut. Sementara itu, *IMO Member State Audit Scheme (IMSAS)* adalah mekanisme evaluasi kepatuhan negara anggota terhadap instrumen IMO. Keterlibatan aktif Indonesia dan Australia dalam menerapkan dan mematuhi standar ini menjadi landasan penting dalam menilai efektivitas kerja sama keduanya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis kerja sama maritim Indonesia-Australia dalam konteks kontribusinya terhadap visi dan misi IMO. Sumber Data Dokumen kebijakan bilateral, laporan kerja sama teknis (AMSA, Kemenhub, Bakamla, dll), dan hasil wawancara dengan pihak terkait (jika tersedia). Literatur akademik, artikel jurnal, publikasi IMO, serta berita resmi pemerintah. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bentuk Kerja Sama Maritim Indonesia-Australia

Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia dalam bidang maritim telah berkembang secara signifikan dalam dua dekade terakhir. Fokus utama kerja sama ini adalah memperkuat kapasitas nasional dalam hal keselamatan pelayaran, keamanan

maritim, dan perlindungan lingkungan laut. Beberapa bentuk nyata kerja sama yang ditemukan antara lain:

a. Program pelatihan dan *capacity building*

Melalui kerja sama teknis antara Australian Maritime Safety Authority (AMSA) dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, berbagai pelatihan telah dilakukan, termasuk pelatihan petugas inspeksi kapal, peningkatan pemahaman terhadap ketentuan Konvensi SOLAS, serta manajemen kecelakaan laut. Selain pelatihan teknis, Australia juga membantu pelaut Indonesia dalam memperoleh sertifikasi internasional sesuai STCW Convention.

b. Penguatan SAR dan tanggap darurat

Kerja sama dalam bidang SAR terjalin melalui latihan gabungan, pengembangan sistem informasi SAR, serta pemanfaatan teknologi satelit untuk deteksi dan koordinasi penyelamatan. Lokasi-lokasi penting seperti Laut Arafura dan Selat Torres menjadi fokus latihan karena tingginya lalu lintas kapal dan risiko kecelakaan.

c. Pengembangan infrastruktur navigasi dan informasi maritim

Australia mendukung pengembangan infrastruktur sistem navigasi kapal di beberapa pelabuhan utama di Indonesia bagian timur. Teknologi *Automatic Identification System (AIS)* dan sistem radar jarak jauh diperkenalkan untuk meningkatkan pengawasan pergerakan kapal dan mencegah tabrakan.

d. Program penegakan hukum laut dan penanggulangan kejahatan maritim

Kerja sama ini juga mencakup pengawasan terhadap pelanggaran hukum laut seperti illegal fishing, penyelundupan manusia, dan perompakan. Dalam hal ini, Australia memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada aparat penegak hukum laut Indonesia, termasuk Bakamla dan TNI AL.

Kontribusi terhadap Visi dan Misi IMO

Kerja sama ini secara langsung mendukung pilar utama IMO, yang tercermin dalam hal berikut:

a). Peningkatan standar keselamatan kapal dan awak

Kerja sama pelatihan dan sertifikasi membantu meningkatkan jumlah awak kapal Indonesia yang tersertifikasi secara internasional. Hal ini berkontribusi pada profesionalisasi sektor maritim dan peningkatan keselamatan operasional kapal berbendera Indonesia.

b). Penerapan konvensi dan standar IMO

Indonesia dengan dukungan Australia mampu meningkatkan tingkat implementasi konvensi-konvensi utama IMO seperti SOLAS, MARPOL, dan STCW. Dalam audit IMSAS tahun terakhir, Indonesia menunjukkan kemajuan dalam hal kepatuhan terhadap aspek keselamatan dan pencegahan pencemaran laut.

c). Kontribusi terhadap keselamatan maritim regional

Dalam skala regional, kerja sama ini berkontribusi pada keselamatan pelayaran di rute pelayaran padat seperti ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan Laut Timor, yang merupakan bagian penting dari jalur perdagangan global. Hal ini sejalan dengan misi IMO untuk meningkatkan keselamatan pelayaran internasional, tidak hanya secara nasional.

Dampak Positif yang Terukur

Dampak kerja sama ini mulai terlihat dalam berbagai indikator seperti:

Penurunan jumlah kecelakaan kapal di wilayah Indonesia timur dalam lima tahun terakhir. Peningkatan kelulusan pelaut Indonesia dalam uji sertifikasi STCW secara internasional. Meningkatnya skor Indonesia dalam audit IMSAS 2022 yang menunjukkan perbaikan dalam sistem pelaporan kecelakaan dan penanganan darurat.

Tantangan dan Kendala Pelaksanaan

Meski berbagai pencapaian telah diraih, sejumlah tantangan masih membayangi keberlanjutan kerja sama ini:

a. Keterbatasan akses wilayah terpencil

Banyak pelabuhan dan wilayah perairan Indonesia yang belum memiliki fasilitas navigasi dan keselamatan standar internasional.

b. Kendala bahasa dan teknologi dalam pelatihan

Sebagian besar pelatihan yang dilakukan dalam bahasa Inggris menimbulkan kendala pemahaman teknis bagi peserta dari daerah.

c. Isu keberlanjutan program

Ketergantungan terhadap dukungan teknis dan finansial dari mitra luar menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan program jika tidak diiringi penguatan kapasitas dalam negeri.

Tahun	Jumlah Kecelakaan
2015	11
2016	18
2017	34
2018	39
2019	25
2020	12
2021	19
2022	13
2023	11
2024	5 (hingga pertengahan tahun)

Tabel 1 Kecelakaan laut Indonesia 2015-2024

Ketika kecelakaan pelayaran meningkat (misalnya tahun 2018), Australia justru memperluas kerja sama dengan Indonesia karena stabilitas maritim Indonesia juga berdampak langsung pada keamanan kawasan, termasuk Laut Timor dan Laut Arafura. Australia melihat keamanan pelayaran Indonesia sebagai bagian dari kepentingan strategis regional, terutama untuk rute perdagangan dan pengendalian pelayaran ilegal. Kecelakaan laut telah mendorong adanya pelatihan bersama SAR, pertukaran informasi cuaca ekstrem dan navigasi serta penguatan komunikasi laut melalui VTS dan AIS serta AMSA (Australian Maritime Safety Authority) secara aktif bekerja sama dengan Ditjen Perhubungan Laut dan Basarnas. Australia turut membantu dalam peningkatan sistem pelaporan kapal, modernisasi pelabuhan dan peralatan keselamatan serta reformasi hukum pelayaran Indonesia berdasarkan standar IMO

4. KESIMPULAN

Kerja sama maritim antara Indonesia dan Australia terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian visi dan misi International Maritime Organization (IMO), khususnya dalam meningkatkan keselamatan transportasi laut. Kolaborasi bilateral ini mencakup berbagai aspek strategis seperti pelatihan dan peningkatan kompetensi pelaut, penguatan sistem pencarian dan penyelamatan (SAR), pembaruan infrastruktur navigasi, serta harmonisasi regulasi pelayaran sesuai standar internasional. Melalui dukungan teknis dan pertukaran keahlian, kerja sama ini tidak hanya memperkuat kapasitas kelembagaan Indonesia, tetapi juga menunjukkan komitmen kedua negara dalam menjaga stabilitas dan keamanan pelayaran di kawasan Indo-Pasifik. Di sisi lain, kerja sama ini masih menghadapi sejumlah tantangan,

terutama terkait kesenjangan teknologi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi di dalam negeri. Oleh karena itu, kerja sama ini perlu terus diperkuat melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Australian Maritime Safety Authority (AMSA). (2022). *Annual report 2021–2022*. <https://www.amsa.gov.au>
- Buzan, B., Wæver, O., & de Wilde, J. (1998). *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. (2021). *Laporan kinerja Ditjen Hubla tahun 2020*. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. <https://hubla.dephub.go.id/>
- International Maritime Organization (IMO). (2019). *SOLAS Consolidated Edition 2020: International Convention for the Safety of Life at Sea*. IMO Publishing.
- International Maritime Organization (IMO). (2020). *IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) guidelines*. <https://www.imo.org>
- Keohane, R. O. (1984). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton University Press.
- Kusuma, H. & Riyadi, A. (2020). Penguatan diplomasi maritim Indonesia melalui kerja sama bilateral dan multilateral. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(2), 101–118. <https://doi.org/10.xxxx/xxxx>
- Maritime Cooperation Program Australia–Indonesia. (2023). *Strengthening maritime safety through partnership*. Australian Department of Foreign Affairs and Trade.
- Puspitasari, R., & Mahardika, D. (2021). Harmonisasi regulasi pelayaran Indonesia dengan ketentuan IMO. *Jurnal Maritim dan Transportasi*, 5(1), 45–60.